



ARISTONO/PONTIANAK POST

SISTEM: Kakanwil DJPb Edward UP Nainggolan (kanan) menjelaskan tentang sistem pelayanan online kepada rombongan Pontianak Post di kantornya, kemarin.

DJPb Kalbar Komitmen Salurkan Anggaran dengan Cermat

PONTIANAK - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat menjadi salah satu kantor di peringkat atas dalam hal kinerja secara nasional. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalbar Edward UP Nainggolan, saat disambangi Pemred Pontianak Post Heriyanto dan rombongannya kemarin, (12/2).

Menurutnya selain memiliki sistem online yang aman dan minim risiko penyelewengan, pihaknya juga berusaha untuk selalu tepat waktu dan memberikan pelayanan optimal. "Karena itu memang tugas kami untuk "Mengawal APBN, Membangun Negeri". Ini merupakan amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Para pegawai kami harus lebih siap untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik," ujar orang yang baru saja menjabat Kakanwil DJPb Kalbar ini.

Pertemuan antara sendiri berlangsung hangat. Rombongan diajak langsung oleh Edward berkeliling kantor DJPb Kalbar di Jalan KS Tubun tersebut. Office tour tersebut juga memamerkan sejumlah fasilitas dan sistem layanan yang dimiliki direktorat dari Kementerian Keuangan tersebut. Rombongan Pontianak Post

berdiskusi dengan jajaran DJPb Kalbar tentang isu-isu aktual di provinsi ini. Termasuk pengelolaan anggaran oleh masing-masing Pemda dan Satker di Kalbar. Beberapa isu hangat, terkait pengelolaan Dana Desa dan fasilitas pembiayaan yang disubsidi seperti Kredit Usaha Rakyat serta Kredit Usaha Ultra Mikro juga dibahas.

Dalam kesempatan itu, Edward menjelaskan, APBN tahun 2019 mengambil tema "APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia." Di tahun 2019, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, penyelesaian pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Efisiensi serta inovasi pembiayaan juga akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dia juga menyebut, pihaknya sudah melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyerahan Alokasi Transfer

ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di wilayah Kalbar. Total anggaran untuk Kalimantan Barat tahun ini mencapai Rp28,3 triliun. Terdiri dari DIPA sebesar Rp8,8 triliun dan TKDD sebesar Rp19,5 triliun.

Dalam laporannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat juga menyampaikan perkembangan penyerapan anggaran pada tahun lalu. Belanja Pegawai terserap 94 persen atau sejumlah Rp3,1 triliun; Belanja Barang terserap 76 persen atau sejumlah Rp3,4 triliun; Belanja Modal terserap 72 persen atau sejumlah Rp2,4 triliun; Belanja Bantuan Sosial terserap 90 persen atau sejumlah Rp11 miliar; DAK Fisik sudah disalurkan sebesar 81 persen atau sejumlah Rp1,9 triliun; dan Dana Desa sudah disalurkan sebesar 96 persen atau sejumlah Rp1,6 triliun.

Sebagai informasi, audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu: Pemprov Kalimantan Barat, Pemkot Pontianak, Pemkab Kubu Raya, Pemkab Mempawah, Pemkot Singkawang, Pemkab Sanggau, Pemkab Landak, Pemkab Sekadau, Pemkab Ketapang, Pemkab Sintang, dan Pemkab Kapuas Hulu. (ars)